

## KESESUAIAN KLASIFIKASI RUMAHTANGGA MENURUT KEMISKINAN MONETER DAN MULTIDIMENSI DI PROVINSI JAMBI

Syaeful Muslih  
BPS Provinsi Jambi  
smuslih@bps.go.id  
082320315321

**Abstract.** *Official poverty measurement still relies on one dimension, the ability to meet basic needs using monetary approach with a single expenditure variable. In fact, poverty is multidimensional. Comparing multidimensional poverty and monetary poverty is required to strengthen poverty analysis and improve effectiveness of poverty reduction policy. This study aims to compare monetary and multidimensional poverty indicators, both from macrodata (district/city) and microdata (household). This study used multidimensional poverty concept of Oxford Poverty Human Development Initiative which consists of 3 dimensions and 10 indicators, which are applied to 2021 Jambi Province Susenas micro data. The results of this study show that percentage of multidimensional poverty is much higher than monetary poverty and provides different district/city rankings. Comparison of poverty status shows only 3,33 percent with matching poverty status. In non-poor-non-poor classification, the higher international poverty standard used, the lower classification accuracy is. For Poor-non-poor classification, accuracy decreases following increases in international poverty standard. Conversely, non-poor-poor classification increases following increases in international welfare standard. Poor-poor classification increases when welfare standard raises. In addition, the characteristics of population with a deprivation score of 1 indicator has a different pattern from the characteristics of population with a higher level of deprivation score.*

**Keyword:** *deprivation; multidimensional poverty; mismatches*

**Abstraksi.** *Pengukuran kemiskinan secara resmi masih bertumpu pada satu dimensi, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang menggunakan pendekatan moneter dengan variabel tunggal pengeluaran. Padahal, kemiskinan bersifat multidimensi. Penyandingan kemiskinan multidimensi dengan kemiskinan moneter perlu dilakukan untuk memperkuat analisis kemiskinan dan mempertajam kebijakan penurunan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan capaian indikator kemiskinan berdasarkan kemiskinan moneter dan multidimensi, baik dari sisi makro (kabupaten/kota) maupun mikro (rumah tangga). Konsep multidimensi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan konsep Oxford Poverty Human Development Initiative yang memuat 3 dimensi dan 10 indikator, yang diterapkan pada data mikro Susenas Provinsi Jambi tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan kemiskinan multidimensi persentasenya jauh lebih tinggi dibanding kemiskinan moneter dan memberikan ranking kabupaten/kota yang berbeda. Perbandingan status kemiskinan penduduk menunjukkan hanya 3,33 persen dengan status kemiskinan yang sama. Dalam mengelompokan kategori tidak miskin-tidak miskin, semakin besar standar kemiskinan internasional yang digunakan ternyata menurunkan ketepatan klasifikasi. Untuk kategori Miskin-tidak miskin, ketepatan klasifikasi menurun mengikuti naiknya standar kemiskinan internasional. Sebaliknya, untuk klasifikasi tidak miskin-miskin mengalami kenaikan seiring naiknya standar kesejahteraan internasional. Untuk klasifikasi miskin-miskin menunjukkan peningkatan ketika standar kesejahteraannya dinaikkan. Selain itu, kondisi penduduk yang memiliki skor kekurangan (deprivasi) 1 indikator mempunyai pola berbeda dengan karakteristik penduduk dengan tingkat skor kekurangan yang lebih tinggi.*

**Kata kunci:** *deprivasi; kemiskinan multidimensi; ketidaktepatan klasifikasi*

## PENDAHULUAN

Pengukuran kemiskinan masih bertumpu pada satu dimensi, yaitu berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*), terutama untuk angka statistik resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut menggunakan pendekatan moneter yaitu variabel pengeluaran. Variabel tunggal inilah yang digunakan mengkategorikan penduduk menjadi miskin atau tidak. Padahal, kemiskinan bersifat multidimensi. Artinya, seseorang dapat juga dikatakan miskin dengan memperhatikan faktor selain moneter.

Pengukuran kemiskinan unidimensi telah berlangsung lama, sampai pada akhirnya *Oxford Poverty & Human Development Initiative* (OPHI) dan UNDP sejak tahun 2010 melakukan pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi secara global dengan menggunakan data banyak negara (Alkire, 2015). Penelitian tersebut yang pada akhirnya menjadi awal bermunculannya penelitian tentang kemiskinan multidimensi. Namun demikian, perdebatan mengenai bagaimana mengukur kemiskinan multidimensi terus berlanjut dan berkembang (Alkire & Foster, 2011).

Metodologi kemiskinan multidimensi yang dikemukakan Alkire-Foster telah banyak diadopsi oleh banyak negara dan peneliti untuk mengukur kemiskinan multidimensi di berbagai negara (OPHI, 2018). Hasil pengukuran tersebut sangat membantu memetakan penduduk miskin dari berbagai dimensi. Selain itu, dilakukan juga perbandingan antara kemiskinan moneter dengan multidimensi meskipun ada perbedaan konsep, data, metode yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan

data di negaranya (Ravallion, 2011). Perbandingan ini perlu dilakukan untuk memperkuat analisis kemiskinan dan mempertajam kebijakan penurunan kemiskinan.

Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia apalagi di Provinsi Jambi belum ada yang dirilis secara resmi. Badan Pusat Statistik (BPS) yang biasa merilis resmi angka kemiskinan moneter pun belum atau setidaknya tidak mengeluarkan secara resmi angka IKM, walaupun ada publikasinya, itu pun hanya sebagai kajian yang sifatnya khusus (BPS, 2017). Sekalipun demikian, kajian perlu terus dilakukan untuk memperkaya analisis terkait kemiskinan, salah satunya kajian kemiskinan multidimensi di Provinsi Jambi.

Secara resmi, angka kemiskinan Provinsi Jambi pada Maret 2021 mencapai 8,09 persen, dimana kondisi tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan terendah di Kota Sungai Penuh. Kondisi ini hampir tidak pernah berubah dalam 6 tahun terakhir ini (2015-2021), ada kecenderungan bahwa secara rangking kondisi kemiskinan antar kabupaten/kota tidak banyak berubah (BPS Provinsi Jambi, 2022). Padahal untuk menyusun strategi yang tepat dalam percepatan penurunan kemiskinan diperlukan informasi dari berbagai dimensi. Terlebih disparitas kondisi sosial ekonomi antar kabupaten/kota cenderung cukup tinggi.

Selain melakukan penghitungan kemiskinan multidimensi, perlu dilakukan analisis keterbandingan dengan kemiskinan moneter. Hal ini dapat dilakukan untuk penghitungan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Apakah kabupaten termiskin moneter di Provinsi Jambi akan menjadi kabupaten termiskin multidimensi?

Sejauh mana kesesuaian yang akan didapatkan? Inilah isu yang akan coba dijawab dari penelitian ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam pengukuran kemiskinan yang mampu melengkapi rilis kemiskinan yang telah ada. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Oleh karena itu, peneliti tidak menyusun instrument penelitian. Data didapatkan dari BPS Provinsi Jambi berupa mikro data. Variabel penelitian dijelaskan pada setiap dimensi penyusun IKM.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penggunaan data Susenas. Pertama, data Susenas merupakan sumber data penghitungan kemiskinan moneter yang selama ini dirilis resmi oleh BPS. Kedua, beberapa indikator yang ada dalam IKM, baik IKM versi OPHI maupun IKM versi Provinsi Jambi, juga terdapat dalam lembaran pertanyaan kuisisioner Susenas sehingga sangat relevan untuk menjadi basis penghitungan data IKM Provinsi Jambi. Ketiga, sampel data Susenas bisa menjangkau sampai ke tingkat kabupaten/kota sehingga target dari analisis IKM Provinsi Jambi untuk sampai ke level kabupaten/kota bisa terpenuhi. Keempat, pengumpulan data Susenas dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara periodik setiap tahun sehingga bisa dilakukan penghitungan IKM setiap tahun.

Unit analisis penelitian ini adalah rumahtangga sampel Susenas Maret 2021 Provinsi Jambi. Jumlah rumahtangga yang

dijadikan unit analisis ada sebanyak 6.909 rumahtangga.

Penelitian ini melakukan pengukuran kemiskinan multidimensi dengan metode Alkire-Foster yang dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

### **Menentukan Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi**

Penelitian ini menggunakan tiga dimensi dan 10 indikator yang merupakan hasil modifikasi dari yang digunakan oleh (Alkire et al., 2018) yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam penelitian ini, beberapa modifikasi dilakukan pada acuan (*threshold*) beberapa indikator kemiskinan multidimensi menyesuaikan dengan konteks Indonesia dan ketersediaan data.

#### **Dimensi Kesehatan**

Dimensi kesehatan terdiri dari dua indikator yakni penolong persalinan dan kepemilikan asuransi kesehatan. Dalam penelitian ini, penolong persalinan yang dimaksud adalah penolong persalinan terakhir yang tidak ditolong dokter, bidan, atau tenaga medis dan paramedis lainnya dalam dua tahun terakhir periode survei.

Sementara kepemilikan asuransi kesehatan mencerminkan keterjaminan rumahtangga dalam kesehatan sesuai dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Asuransi kesehatan meliputi BPJS baik PBI maupun non-PBI, Asuransi Swasta, dan Asuransi Kantor atau tempat kerja.

#### **Dimensi Pendidikan**

Terdapat dua indikator yang digunakan dalam dimensi pendidikan yakni lama sekolah dan partisipasi sekolah. Indikator lama sekolah pada penelitian ini mencerminkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh anggota rumahtangga umur 18 tahun ke atas dan menggunakan acuan pendidikan sembilan tahun. Sementara itu, indikator partisipasi sekolah mencerminkan

keaktifan anggota rumahtangga umur pendidikan (7-18 tahun) dalam pendidikan formal atau dengan kata lain berstatus masih bersekolah pada jenjang SD atau SMP.

**Dimensi Standar Hidup**

Dimensi standar hidup terdiri dari enam indikator yakni sanitasi, air minum layak, sumber penerangan, bahan bakar memasak, status kepemilikan rumah dan kepemilikan aset.

Indikator sanitasi merujuk pada definisi sanitasi layak SDGs (Bappenas, 2020), rumahtangga yang termasuk akses sanitasi belum layak, apabila rumahtangga (di perkotaan) menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama dengan rumahtangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa dan pembuangan akhir limbahnya ke lubang tanah. Kemudian apabila rumahtangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, dimana jenis kloset yang digunakan berupa plengsengan dengan dan tanpa tutup, serta cubluk/cemplung, dengan pembuangan akhir limbah tangki septik/IPAL/ lubang tanah. Apabila rumah tangga (di perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum seperti toilet terminal, pasar, masjid, dll.

Rumah tangga dikatakan tidak mempunyai akses air minum layak (konsep SDGs, (Bappenas, 2020)) jika rumah tangga tidak menggunakan sumber air minum utama yang berasal dari air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan penampungan air hujan.

Sedangkan untuk rumahtangga yang menggunakan air minum kemasan, maka rumahtangga tersebut dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Rumah tangga dengan jenis sumber penerangan berupa non-listrik, petromaks/aladin, pelita/senter/obor, serta sumber penerangan lainnya.

Rumah tangga yang tidak menggunakan listrik dan gas sebagai bahan bakar memasak.

Rumah tangga yang tidak memiliki aset perumahan: kontrak, sewa, bebas sewa milik orang lain, bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara, dan lainnya.

Rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor, radio, kulkas, telepon, atau televisi.

**Menentukan Bobot Tertimbang dari Masing-Masing Indikator**

Penelitian ini perhitungan IKM menggunakan pembobotan yang sama (*equal weighting*) untuk setiap dimensi kemiskinan yang digunakan. Tiga dimensi kemiskinan tertimbang secara sama sehingga setiap dimensi akan memiliki bobot sebesar 1/3 atau 33,33 persen. Demikian juga dengan masing-masing indikator pada tiap dimensi juga akan akan memiliki bobot tertimbang yang sama dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator dalam Pengukuran Kemiskinan Multidimensi

Dimensi	Indikator	Syarat Miskin Multidimensi	Bobot
Kesehatan	Penolong Persalinan	Terdapat anggota rumah tangga yang proses persalinannya tidak ditolong dokter, bidan, atau tenaga medis, dan paramedis lainnya.	1/6
	Asuransi Kesehatan	Ada anggota rumah tangga tidak memiliki asuransi kesehatan.	1/6

Dimensi	Indikator	Syarat Miskin Multidimensi	Bobot
Pendidikan	Partisipasi Sekolah	Ada anggota rumah tangga umur 7-18 tahun tidak menamatkan pendidikan SMP	1/6
	Lama Sekolah	Tidak ada anggota rumah tangga dewasa (18 tahun ke atas) yang lulus pendidikan SMP (9 tahun)	1/6
Standar Hidup	Sanitasi	Rumahtangga tidak memiliki akses sanitasi layak (mengacu konsep SDGs)	1/18
	Air Minum Layak	Rumahtangga tidak memiliki akses air minum layak (mengacu konsep SDGs)	1/18
	Sumber Penerangan	Rumahtangga dengan sumber penerangan bukan listrik	1/18
	Bahan Bakar Memasak	Rumah tangga tidak menggunakan listrik dan gas sebagai bahan bakar	1/18
	Status Kepemilikan Rumah	Rumahtangga yang menempati rumah bukan milik sendiri atau rumah dinas	1/18
	Aset	tidak memiliki mobil atau perahu motor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor, radio, kulkas, telepon, atau televisi	1/18

Sumber: *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (2018), dimodifikasi

### Menentukan Rumah Tangga yang Miskin Multidimensi

Setiap rumahtangga akan diberi skor sesuai dengan ketidakmampuan yang dialami rumahtangga pada masing-masing indikator. Penilaian terhadap tiap rumahtangga untuk seluruh indikator akan dihitung berdasarkan metode Alkire-Foster yang juga diadopsi dalam penghitungan kemiskinan multidimensi BPS (2014).

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (*deprivation*) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dimensi pendidikan dan kesehatan terdiri dari 2 indikator, sementara dimensi standar hidup terdiri dari 6 indikator. Setiap rumah tangga yang mengalami kekurangan (*deprivation*) diberi skor 1 dan yang tidak mengalami kekurangan diberi skor 0. Jumlah dari skor setiap rumah tangga menunjukkan kekurangan multidimensi rumah tangga.

Setiap orang diberi skor sesuai dengan kekurangan rumah tangganya menurut 10 indikator yang membentuknya. Skor

maksimum adalah 100 persen sehingga masing-masing dimensi memiliki penimbang yang sama, yaitu 33,3 persen. Dimensi pendidikan dan kesehatan masing-masing memiliki dua indikator, sehingga setiap komponen memiliki penimbang sebesar 16,7 persen. Sementara dimensi standar hidup memiliki 6 indikator sehingga setiap indikator memiliki penimbang sebesar 5,6 persen (Alkire, 2018).

Alkire dan Foster (2011) mengidentifikasi kemiskinan rumah tangga secara multidimensi berdasarkan skor ke 10 komponen indikator untuk setiap rumah tangga dijumlahkan. Sebuah *cut off point* (c) sebesar 33,3 persen yang setara dengan sepertiga dari indikator tertimbang digunakan untuk membedakan antara RT yang miskin dan tidak miskin secara multidimensi.

Jika  $c \geq 33\%$ , maka RT dan seluruh anggota RT dianggap miskin multidimensi. Jika  $c \geq 50\%$ , maka RT dan seluruh anggota RT dianggap sangat miskin multidimensi. Jika  $c < 33,3\%$ , maka RT dan

seluruh anggota RT tidak dianggap miskin multidimensi. Jika  $20\% \leq c < 33,3\%$ , maka RT dan seluruh anggota RT dianggap rentan miskin multidimensi.

Nilai IKM merupakan hasil perkalian antara multidimensi *Headcount Ratio* dan Intensitas atau luasnya kemiskinan. *Headcount ratio* (H) adalah proporsi penduduk yang miskin:

$$H = \frac{q}{n} \quad (1)$$

dimana  $q$  adalah jumlah orang yang multidimensi miskin,  $n$  adalah total populasi.

Intensitas kemiskinan (A) mencerminkan proporsi tertimbang dari indikator, atau rata-rata kekurangan dari orang-orang miskin. Untuk rumah tangga miskin saja, nilai kekurangan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total orang miskin:

$$A = \frac{\sum_1^q c}{q} \quad (2)$$

dimana  $q$  adalah jumlah orang yang multidimensi miskin,  $c$  adalah skor kekurangan masing-masing RT.

IKM adalah perkalian antara *multidimensional headcount ratio* (H) dengan *Average deprivation shared among the poor* (A) atau intensitas kemiskinan multidimensi. *Headcount ratio* adalah proporsi penduduk miskin yang diperoleh dengan membagi jumlah individu yang miskin multidimensi terhadap total populasi penelitian. Jumlah individu yang miskin multidimensi merupakan jumlah anggota rumah tangga termasuk kepala rumah tangga yang teridentifikasi miskin multidimensi.

$$IKM = H.A = \frac{\sum_1^q c}{n} \quad (3)$$

Menggambarkan rata-rata kekurangan terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan

standar hidup (perumahan) yang dialami penduduk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

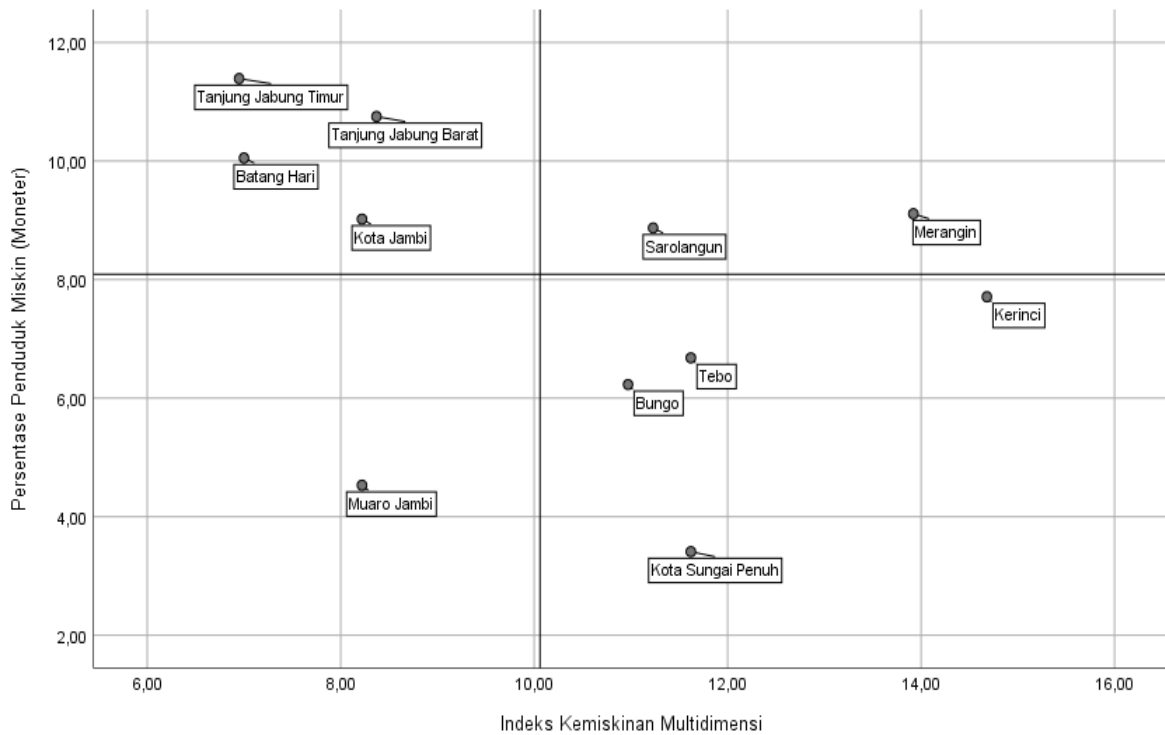
Hasil pengolahan kemiskinan multidimensi menunjukkan 26,61 persen penduduk Provinsi Jambi termasuk ke dalam kategori miskin multidimensi. Serta Intensitas kemiskinan sebesar 38,06 persen, artinya rata-rata jumlah ketidakmampuan yang dialami penduduk dalam rumah tangga miskin sebesar 38,06 persen atau sekitar 4 (empat) dari 10 indikator IKM. Sementara itu angka IKM diperoleh sebesar 10,06 persen, menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketidakmampuan atau kekurangan yang dialami penduduk sebanyak 1 indikator dari 10 indikator IKM.

Tabel 2. Persentase dari Indikator Kemiskinan Multidimensi Provinsi Jambi Tahun 2021

Indikator	Persentase
Penduduk Miskin ( <i>Headcount Ratio</i> ) (H)	26,42
Intensitas Kemiskinan (A)	38,06
Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)	10,06

Sumber: Susenas, diolah 2021

Angka kemiskinan moneter Provinsi Jambi pada maret 2021 sebesar 8,09 persen, jauh lebih rendah dari persentase penduduk miskin multidimensi yang mencapai 26,42 persen. Hal ini memberikan kesimpulan yang sama dengan hasil penelitian Budiantoro, dkk (2015) yang menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin multidimensi untuk 34 provinsi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan moneternya.



Gambar 1. Sebaran Kabupaten/Kota menurut Tingkat Persentase Penduduk Miskin (Moneter) dengan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)  
 Sumber: Susenas, diolah 2021

Hasil perbandingan kemiskinan moneter dan multidimensi antar kabupaten/kota ditunjukkan oleh Gambar 1. Ternyata, hanya ada satu kabupaten yang dapat dikategorikan dengan tingkat persentase penduduk miskin yang rendah serta indeks kemiskinan multidimensinya pun rendah, yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Sebaliknya terdapat dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun dan Merangin yang persentase penduduk miskin maupun indeks kemiskinan multidimensi yang sama-sama tinggi.

Sementara itu, untuk dua kabupaten yang selalu memiliki persentase kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, ternyata indeks kemiskinan multidimensinya cukup rendah. Bahkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 6,95 persen. Begitu pun sebaliknya,

Kota Sungai Penuh yang memiliki persentase penduduk miskin terendah, ternyata indeks kemiskinan multidimensinya cukup tinggi, lebih tinggi dari capaian angka provinsi yang sebesar 10,06 persen.

Deprivasi yang dialami penduduk di setiap kabupaten/kota pada tiap dimensi ditunjukkan oleh Tabel 3. Seluruh kabupaten mengalami kekurangan (deprivasi) tertinggi pada dimensi kesehatan, sedangkan untuk kota, yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh kemiskinan multidimensinya didominasi oleh dimensi pendidikan. Tingkat intensitas disini menggambarkan sebesar besar kontribusi tiap dimensi terhadap seseorang yang masuk sebagai kategori miskin multidimensi.

Tabel 3. Sebaran Kontribusi Intensitas Kemiskinan Multidimensi (%) menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kontribusi Intensitas Kemiskinan Multidimensi (%)		
	Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup
Kerinci	40,22	32,13	27,65
Merangin	43,47	26,59	29,94
Sarolangun	44,38	32,08	23,55
Batang Hari	42,97	32,55	24,48
Muaro Jambi	44,77	41,37	13,86
Tanjung Jabung Timur	46,01	37,23	16,76
Tanjung Jabung Barat	47,11	36,52	16,37
Tebo	43,99	34,92	21,09
Bungo	44,79	27,38	27,83
Kota Jambi	44,45	45,53	10,02
Kota Sungai Penuh	34,83	36,70	28,47
Provinsi Jambi	43,83	34,53	21,64

Sumber: Susenas, diolah 2021

Selain menemukan klasifikasi yang berbeda dari kemiskinan multidimensi dan moneter kabupaten/kota (Gambar 1),

Tabel 4. Tabulasi Silang Penduduk menurut Status Kemiskinan Moneter dan Multidimensi Provinsi Jambi Tahun 2021 (%)

Status Kemiskinan Moneter	Kategori Miskin Multidimensional				Total
	Tidak miskin multidimensi	Rentan miskin multidimensi	Miskin multidimensi	Sangat miskin multidimensi	
Tidak Miskin	32,67	15,10	13,33	0,87	61,97
Rentan Miskin	9,13	5,73	5,39	0,53	20,77
Hampir Miskin	2,86	3,32	2,71	0,27	9,17
Miskin	1,47	1,76	2,12	0,32	5,67
Sangat Miskin	0,56	0,97	0,70	0,19	2,42
Total	46,69	26,89	24,25	2,17	100,00

Sumber: Susenas, diolah 2021

Penggunaan standar kesejahteraan internasional dalam hal ini *purchasing power parity* (PPP) bisa juga digunakan untuk bisa melihat bagaimana kecocokan

penelitian ini juga menemukan perbedaan klasifikasi pada status kemiskinan penduduk seperti pada Tabel 4.

Ada sebesar 4,77 persen penduduk yang miss-klasifikasi, dimana sebelumnya dinyatakan miskin (miskin dan sangat miskin) secara moneter namun ternyata tidak miskin (tidak miskin dan rentan) multidimensi. Angka 4,76 persen merupakan penjumlahan angka yang dicetak tebal pada Tabel 4 di sisi kiri bawah.

Sebaliknya, ada sebanyak 23,10 persen penduduk yang dikategorikan miskin (miskin dan sangat miskin) multidimensi namun tidak miskin (tidak miskin, rentan, dan hampir miskin) secara moneter. Angka ini didapat dari penjumlahan angka yang dicetak tebal pada Tabel 4 di sisi kanan atas. Hanya ada sebesar 3,33 persen yang cocok klasifikasi, yaitu dinyatakan miskin (miskin dan sangat miskin) baik metode moneter maupun kemiskinan multidimensi. Angka ini didapat dari penjumlahan empat sel tabel (tidak dicetak tebal) di bagian kanan bawah Tabel 4.

klasifikasi kemiskinan multidimensi (Evans et al., 2020).

Dalam mengelompokan kategori tidak miskin-tidak miskin, semakin besar standar kemiskinan internasional yang digunakan



ternyata menurunkan ketepatan klasifikasi, dari 72,84% (1,9\$) menjadi 32,89%(5,5\$). Begitu juga untuk kategori Miskin-tidak miskin, menurun juga mengikuti naiknya standar kemiskinan internasional, dari 25,86%(1,9\$) menjadi 17,31%(5,5\$).

Tabel 5. Kondisi Klasifikasi Kesejahteraan Penduduk menurut Status Kemiskinan Multidimensi dan Internasional

Perbandingan Kondisi Kemiskinan	Standar Kesejahteraan Internasional		
	1,9\$ PPP	3,2\$ PPP	5,5\$ PPP
Multidimensi dan Internasional			
Tidak Miskin-Tidak Miskin	72,84	61,23	32,89
Tidak Miskin-Miskin	0,74	12,35	40,68
Miskin-Tidak Miskin	25,86	19,44	9,11
Miskin-Miskin	0,56	6,99	17,31

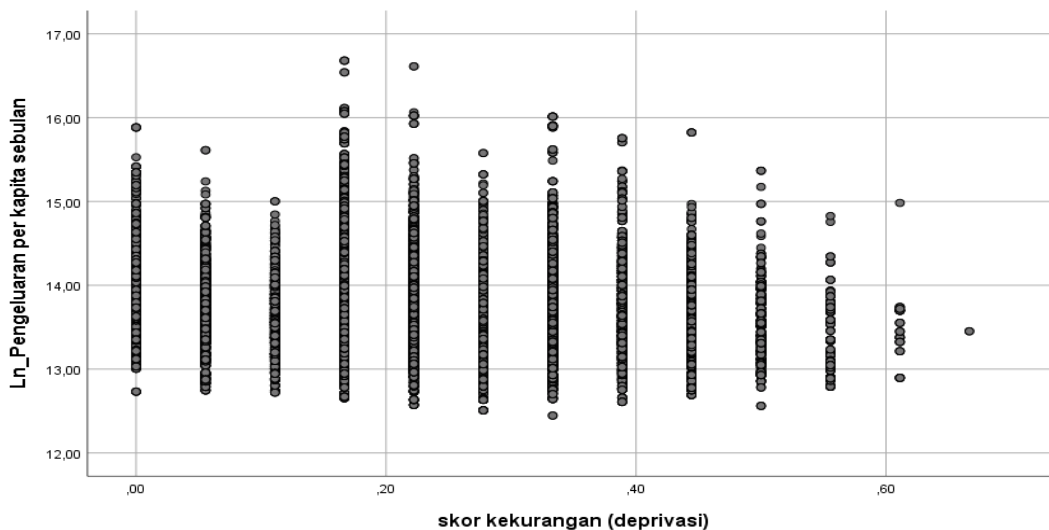
Sumber: Susenas, diolah 2021

Sebaliknya untuk klasifikasi tidak miskin-miskin, mengalami kenaikan seiring dengan naiknya standar kesejahteraan internasional, dari 0,74% (1,9\$) menjadi 40,68% (5,5\$). Begitu juga untuk klasifikasi

miskin-miskin menunjukkan peningkatan ketika standar kesejahteranya dinaikan, dimana awalnya sebesar 0,56% (1,9\$) meningkat menjadi 17,31% (5,5\$).

Ada hal menarik, ketika skor kekurangan (deprivasi) disandingkan dengan tingkat pengeluaran per kapita sebulan, dimana untuk skor kekurangan yang sedikit (0-0,11) ternyata tingkat pengeluaran perkapita menurun seiring dengan naiknya skor kekurangan. Namun setelah skor kekurangan 0,17 ternyata sebaran pengeluaran perkapitanya juga mengalami kenaikan, baru kemudian setelah itu mengalami penurunan sampai dengan skor kekurangan 0,67.

Kondisi penduduk yang memiliki skor kekurangan antara 0-0,11 bisa dikatakan mempunyai pola berbeda dengan karakteristik penduduk dengan tingkat skor kekurangan lainnya. Biasanya pada skor kekurangan rendah itu dialami oleh penduduk dengan pengeluaran per kapita yang tinggi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Evans et al., 2020).



Gambar 2. Sebaran Rumahtangga menurut Skor Kekurangan (Deprivasi) menurut Pengeluaran per Kapita Sebulan (Logaritma Natural)

Sumber: Susenas, diolah 2021

## SIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hasil kemiskinan multidimensi kabupaten/kota di Provinsi Jambi memberikan gambaran kondisi (ranking) yang berbeda dengan kemiskinan moneter kabupaten/kota.

Dalam mengelompokan kategori tidak miskin (multidimensi)-tidak miskin (moneter), semakin besar standar kemiskinan internasional yang digunakan ternyata menurunkan ketepatan klasifikasi. Begitu juga untuk kategori Miskin (multidimensi)-tidak miskin (moneter), ketepatan klasifikasi menurun juga mengikuti naiknya standar kemiskinan internasional. Sebaliknya untuk klasifikasi tidak miskin (multidimensi)-miskin (moneter), mengalami kenaikan seiring dengan naiknya standar kesejahteraan internasional. Begitu juga untuk ketepatan klasifikasi miskin (multidimensi)-miskin

(moneter) menunjukkan peningkatan ketika standar kesejahteraannya dinaikan.

Saran untuk penelitian selanjutnya, bisa memasukan variabel pengeluaran/pendapatan sebagai salah satu indikator kemiskinan multidimensi. Serta melakukan pengecekan indikator multidimensi yang *robust* dengan dilakukan pengolahan untuk beberapa tahun.

Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini adalah perlunya pemerintah mempertimbangkan hasil penelitian atau analisis kemiskinan multidimensi dalam penyusunan berbagai kebijakan. Sekalipun secara resmi, kemiskinan masih menggunakan pengukuran moneter; pemerintah Provinsi Jambi sebaiknya tidak hanya berfokus pada dimensi tunggal terkait pembangunan di tingkat kabupaten/kota yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S. (2015). Global multidimensional poverty index. In *Pakistan Development Review* (Vol. 54, Issue 4). <https://doi.org/10.30541/v54i4i-iipp.287-299>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. In *Journal of Public Economics* (Vol. 95, Issues 7–8). <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Understandings and misunderstandings of multidimensional poverty measurement. In *Journal Econ Inequal* (9): 289-314. <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9181-4>
- Alkire, S., Kanagaratman, U., & Suppa, N. (2018). The Global Multidimensional Poverty Index (MPI): 2018 Revision. *OPHI MPI Methodological Notes* 46, 31(7), 1800–1806. <http://hdr.undp.org/en/2018-MPI>
- Bappenas. (2020). Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Lingkungan. In *Kementerian PPN/Bappenas* (Edisi II). [https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Metadata-Pilar-Lingkungan-Edisi-II\\_REV3.pdf](https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Metadata-Pilar-Lingkungan-Edisi-II_REV3.pdf)
- BPS. (2014). *Analisis Sosial Ekonomi Rumah tangga Usaha Pertanian*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2017). *Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-Hak Dasar Anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

- BPS Provinsi Jambi. (2022). *Analisis Kondisi Kemiskinan Provinsi Jambi 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Budiantoro, dkk. (2015). *Penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2014*. Prakarsa.
- Evans, M. Nogaes, R. And Robson, M. (2020). Monetary and multidimensional poverty: Correlations, mismatches, and joint distributions, *OPHI Working Paper 133*, University of Oxford.
- Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018). *Global Multidimensional Poverty Index 2018 : The Most Detailed Picture To Date of the World's Poorest People*, University of Oxford, UK.
- Ravallion, M. (2011). On multidimensional indices of poverty. *Journal of Economic Inequality*, 9(2), 235–248. <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9173-4>